

## **Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman**

Nur Azizah Abrida Basuni<sup>1\*</sup> Abdul Halim<sup>2</sup>

### **Intisari**

Isu manajemen strategis pendidikan telah menjadi isu umum di Indonesia, terutama tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia. Hal ini menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karenanya, pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun yang dilengkapi dengan adanya dana BOS. Untuk pengelolaan dana pendidikan yang efektif dan efisien, melengkapi kekurangan dana BOS, serta melaksanakan desentralisasi pendidikan maka dibuatlah program dana BOSDA.

LHP atas LK Pemda Kabupaten Sleman ditemukan adanya pengendalian pengelolaan keuangan atas dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan belum memadai. Adanya permasalahan tersebut menimbulkan isu baru pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tentang pemenuhan akuntabilitasnya terkait program dana BOSDA. BPK merekomendasikan untuk menyusun mekanisme BOSDA dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM. Adanya kebutuhan untuk pembuatan mekanisme baru dan mengurangi adanya kesalahan saat mekanisme berjalan dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh atas mekanisme dana BOSDA di Disdik Sleman.

Penelitian ini melakukan evaluasi menyeluruh dengan metode evaluasi CIPP pada mekanisme BOSDA, baik dari sisi pengguna yaitu instansi pendidikan dan sisi pengelola yaitu Disdik Sleman. Ditemukan bahwa akuntabilitas telah terpenuhi dan keterbatasan SDM bukan menjadi masalah utama namun masih terdapat masalah lain yang mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya permasalahan yang terjadi setelah rekomendasi dilaksanakan. Permasalahan tersebut meliputi desain program, kapabilitas program, pengendalian dan strategi program dan belum adanya bagan alur dan indikator keberhasilan program menjadi hal yang harus dibenahi oleh Disdik Sleman.

Kata kunci: BOSDA;Akuntabilitas;Metode CIPP.

## PENDAHULUAN

Otonomi daerah telah ada di Indonesia sejak tahun 1930, yang kala itu Indonesia masih dalam masa Penjajahan Belanda. Hal ini telah tercantum juga dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan prinsip yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab.

Isu manajemen strategis pendidikan sendiri sudah menjadi isu yang umum terjadi di Indonesia, terutama tentang rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia di mata dunia menjadi hal yang krusial yang harus diperhatikan oleh bangsa Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 menyebutkan salah satu cita-cita negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun dengan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam rangka mensukseskan program tersebut dibuatlah program dana BOS untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Desentralisasi pendidikan juga menuntut adanya

perubahan dalam pengelolaan dana pendidikan agar lebih efisien dan efektif. Adanya kekurangan dana dari dana BOS yang telah diterima sekolah menuntut pemerintah daerah untuk membuat program dana BOSDA untuk melengkapi kekurangan dana dari dana BOS.

Penelitian tentang analisis pengaruh dana BOSDA terhadap kinerja keuangan dan indeks prestasi belajar peserta didik sudah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Selly (2020), Jusmin (2019), Neillisa dkk. (2018), Adawiah (2016) dan Pahlawan (2021). Ditemukan juga berbagai masalah dalam pelaksanaan program dana BOSDA di instansi pendidikan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana BOSDA, dasar hukum yang belum jelas hingga perubahan peraturan tentang BOSDA yang berubah dengan cepat, belum tercapainya efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi serta belum dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat seperti pada Sustrisnawari dkk., (2021), Pahlawan (2021), Hasanah (2019), dan Istanti (2013).

*New Public Management* (NPM) menegaskan bahwa kinerja administrasi publik tidak hanya dinilai atas nilai ekonomi, efisiensi dan efektivitas melainkan juga pada nilai sosial. Kinerja administrasi publik juga harus mewujudkan

nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, termasuk dalam pelaksanaan mekanisme dana BOSDA.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim bahwa pengendalian pengelolaan keuangan atas dana BOSDA oleh Dinas Pendidikan belum memadai. Klaim ini disebabkan dengan adanya dua temuan yaitu adanya kesalahan dalam mekanisme SP2D Tambah Uang (TU) yang tidak sesuai dengan ketentuan serta permasalahan dalam penatausahaan di sekolah. BPK menganalisis bahwa hal ini disebabkan mekanisme yang dilaksanakan tidak mempertimbangkan ketersediaan SDM.

Adanya permasalahan tersebut menimbulkan isu baru pada Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman tentang pemenuhan akuntabilitasnya terkait program dana BOSDA yang dikelolanya. BPK merekomendasikan untuk Disdik Sleman menyusun mekanisme BOSDA kembali dengan mempertimbangkan ketersediaan SDM. Proses penyusunan mekanisme ini akan lebih optimal apabila dilakukan evaluasi secara menyeluruh pada mekanisme BOSDA baik dari sisi pengguna maupun dari sisi pengelola

sehingga perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

### **Akuntabilitas**

Salah satu prinsip utama dalam mewujudkan pengelolaan pemerintah yang baik (good governance) adalah akuntabilitas (Sawir, 2017). Akuntabilitas dipandang penting dalam sebuah perusahaan dan organisasi non-profit baik pemerintahan maupun non pemerintahan (Kholmi, 2010). Dubnick (2005) berpandangan bahwa akuntabilitas merupakan ciri khas pemerintahan demokratis modern dan konsep sentral dalam manajemen publik. Salajegheh *et al.* (2013) menambahkan bahwa akuntabilitas publik dianggap sebagai kriteria penting dalam manajemen publik dan merupakan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

Dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 dijelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Hopwood & Tomkins (1984) menjelaskan bahwa terdapat dimensi

akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga publik antara lain:

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran  
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga publik untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law enforcement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktek dan maladministrasi.
2. Akuntabilitas Proses  
Akuntabilitas proses terkait dengan prosedur yang digunakan dalam administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan biaya yang murah.
3. Akuntabilitas Program  
Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai

atau tidak. Selain itu, apakah organisasi telah mempertimbangkan alternatif program lainnya yang memberikan hasil lebih optimal dengan biaya minimal. Lembaga-lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

4. Akuntabilitas Kebijakan  
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan.

#### **Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA)**

Bantuan Operasional Sekolah Daerah adalah program bantuan untuk operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada satuan pendidikan formal yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah dan melengkapi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat. Dana BOSDA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan berdasarkan amanat dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan

wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Perbup Kab. Sleman Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa besaran nominal BOSDA disesuaikan dengan kemampuan daerah terkait dan besaran BOSDA setiap peserta didik ditetapkan oleh Bupati. Sementara alokasi pada setiap sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan perhitungan jumlah peserta didik penerima BOSDA. Sekolah wajib menerima dan menggunakan dana dari BOSDA tersebut.

Mekanisme pengelolaan BOSDA berbeda antara sekolah negeri dan swasta. Apabila sekolah negeri pemberian dari dana BOSDA didasarkan pada program kegiatan pemerintah daerah sedangkan sekolah swasta didasarkan pada proposal permohonan sekolah tersebut.

Selain dikelola dana BOSDA harus dicatat untuk kemudian dilaporkan kepada Dinas Pendidikan. Penatausahaan atas dana BOSDA dilaksanakan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja sekolah yang kemudian nantinya dilaporkan paling lambat lima hari setelah periode semester berjalan berakhir.

### **Pertanggungjawaban Belanja Pemerintah Daerah.**

Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih (UU Nomor 17 Tahun 2003). Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 2021 dijelaskan bahwa belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran yang bersumber dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan, apabila pengeluaran dilakukan melalui bendahara pengeluaran maka, diakui saat disahkannya pengeluaran tersebut (Republik Indonesia, 2021).

Semua belanja yang dilaksanakan pada organisasi sektor publik harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan rancangan anggaran yang telah dibuat sebelumnya, dikarenakan laporan anggaran sebelumnya pada hakikatnya adalah sebuah janji yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait kepada masyarakat dengan tujuan utama adalah mensejahterakan masyarakat.

Pengelolaan keuangan dalam organisasi sektor publik harus dilaksanakan dengan asas taat, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Hal ini juga diterapkan dalam pengelolaan belanja Pemda yang harus dilaksanakan dengan mengacu prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Hal ini juga termasuk dalam pengelolaan BOSDA.

## **Evaluasi Program**

Evaluasi program merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi sejauh mana tujuan dan sasaran program telah terealisasi dengan membandingkan kinerja yang telah dilaksanakan dengan standar untuk mengetahui kesenjangan penilaian baik penilainya harga, kualitas, dan juga penyelidikan sistematis tentang nilai ataupun kualitas pada suatu objek (Briekerhoff et al., 1983:2). Sedangkan menurut Tyler evaluasi program merupakan proses untuk mengetahui apakah tujuan dari pelaksanaan program sudah dapat terealisasi atau belum.

National Study Committee on Evaluation menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk memastikan keputusan yang menjadi perhatian ataupun ketertarikan, memilah informasi dan mengumpulkannya untuk kemudian menganalisis untuk mendapatkan ringkasan data yang berguna dalam pengambilan keputusan (Stark dan Thomas, 1994:12). Evaluasi program merupakan kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan substansi, implementasi, dan dampak dari program tersebut (Anderson, 2010).

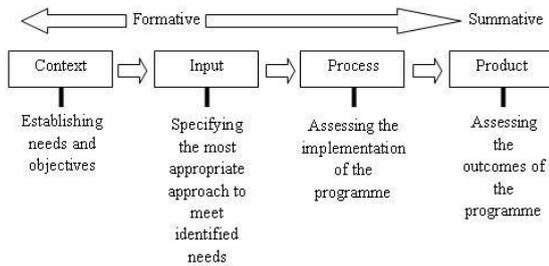
Tujuan dari evaluasi program menurut Weiss (1972:4) untuk melihat penggunaan dari program, hasil dari

program, kriteria penilaian program, serta kontribusi yang akan dihasilkan dari program baik dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program kedepannya. Sementara menurut Scriven (1976) evaluasi program memiliki dua fungsi yang substansi yaitu formatif yang digunakan untuk perbaikan tahun berjalan dan fungsi sumatif yang digunakan untuk pertanggungjawaban dan perbaikan dimasa mendatang. Sementara menurut Tayibnapis (2000:59) tujuan dari evaluasi program sangatlah beragam yang pada intinya adalah untuk mengukur realisasi dan tujuan awal dari program sehingga mendapatkan informasi yang akurat dan objektif terkait program sehingga dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dan pertimbangan baik di masa kini maupun dimasa mendatang.

## **Model Evaluasi *Context, Input, Process, dan Product* (CIPP)**

Evaluasi Model CIPP ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1965 di Ohio State University. Model ini mulai dikenalkan kepada publik setelah Stufflebeam berhasil melakukan evaluasi The Elementary and Secondary Education Act (ESEA). Dibandingkan dengan jenis-jenis model evaluasi program, model CIPP lebih banyak digunakan oleh evaluator dikarenakan model ini dinilai

lebih komprehensif dibandingkan model-model lainnya (Mahmudi, 2011).



Gambar 2. 1 Model CIPP

Model CIPP adalah model fungsional komprehensif yang mempertimbangkan semua aspek program atau sistem (Vali *et al.*, 2020). Sedangkan menurut Lippie dan Crater (2018) Model CIPP bersifat fleksibel dan preskriptif ketika digunakan untuk menilai kualitas program.

Pemilihan model ini dibandingkan dengan model evaluasi lain terkait pada pendekatan evaluasi yang digunakan yaitu dengan management-oriented evaluation approach atau evaluasi manajemen program. Model ini memperhatikan bukan hanya ketercapaian tujuan dari evaluasi program yaitu membuktikan (to prove) namun juga meningkatkan (to improve) (Stufflebeam dan Shinkfield, 1986). Owen dalam bukunya yang berjudul Evaluation Program: Forms and Approach mengatakan bahwa model CIPP adalah model evaluasi pengembangan (evaluation development) yang berarti model CIPP diterapkan dalam

rangka mendukung organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi dalam mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis sehingga diharapkan program dapat berjalan dengan lancar.

Terdapat satu model lain yang memiliki sifat seperti model evaluasi CIPP yaitu model Countenance dan formatif. Kedua model tersebut memiliki pendekatan evaluasi dan tujuan yang sama yaitu meningkatkan program. Apabila dibandingkan dengan model Countance, model CIPP memiliki pengevaluasian yang lebih detail pada pelaksanaannya. Sedangkan model lain cenderung lebih simpel.

Keunikan model CIPP dibandingkan model lainnya yaitu pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (decision) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP, akan memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yang dilakukan. Walaupun hal ini akan menjadikan model ini terkesan lebih ribet, namun hal ini menjadikan model ini lebih detail.

Evaluasi *context* berisi alasan tentang mengapa kegiatan evaluasi dilaksanakan sekaligus tujuan (*goal*) dari pelaksanaan evaluasi (Worthen & Sanders,

1979). Evaluasi konteks ini dapat menggambarkan apakah program dana BOSDA pada Dinas Kabupaten Sleman sudah memenuhi kebutuhan murid dan institusi pendidikan yang berada di Kabupaten Sleman.

Evaluasi *input* berisi evaluasi tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan organisasi dengan sumber daya yang tersedia ataupun sebaliknya tentang sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat mencapai tujuan program. Evaluasi ini akan melihat seberapa besar kapabilitas dari sistem BOSDA.

Evaluasi *process* dilaksanakan untuk melihat apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan strategi yang dirumuskan, mengidentifikasi cacat dalam prosedur implementasinya sehingga dapat dilakukan perbaikan program. Stufflebeam juga mengatakan bahwa evaluasi proses merupakan pengecekan yang berkelanjutan atas implementasi perencanaan (Stufflebeam & Shienfield, 1985:175). Worthen and Sanders (1973) juga mengatakan bahwa tujuan utama dari evaluasi proses adalah mengetahui kelemahan pelaksanaan program serta kekuatan yang muncul selama proses pelaksanaan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang telah ditetapkan,

dan melakukan dokumentasi mengenai hal-hal yang penting saat pengimplementasian.

Evaluasi *Product* digunakan untuk dapat mengidentifikasi dan menilai persentase hasil yang diperoleh dengan hasil yang telah ditetapkan dapat tercapai. Menurut Stufflebeam dan Shienfield (1985: 176) evaluasi ini akan mengukur, menginterpretasikan dan menilai pencapaian atas program termasuk kelayakan dan keberhargaan program. Hasil yang dapat dinilai dari evaluasi ini berupa skor, diagram, data observasi, sosiometri dan sebagainya yang dapat diperbandingkan dengan target-target tujuan yang lebih rinci.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini akan menggunakan desain penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif serta menggunakan model evaluasi CIPP. Metode evaluasi CIPP ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang mengeksplorasi dan mendefinisikan makna dari beberapa individu ataupun kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya (Creswell, 2014). Penelitian kualitatif juga mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi wawancara yang bersifat interaktif dan fleksibel (Sugiyono, 2012).

Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Dilakukan *pilot test* terlebih dahulu sebelum dilakukan penyebaran kuesioner. *Pilot test* digunakan untuk *pretest* yang diambil untuk melihat sampel partisipan apakah telah memahami maksud yang ingin disampaikan penulis melalui kuesioner. Dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas untuk memeriksa akurasi hasil penelitian.

### **Hasil dan Pembahasan**

Informan wawancara dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, berasal dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman dan perwakilan instansi pendidikan penerima dana BOSDA dari Disdik Sleman. Untuk mencapai saturasi data dan untuk menangkap fenomena akan permasalahan dalam mekanisme BOSDA peneliti menyebarkan kuesioner ke seluruh instansi pendidikan tersebut yang berjumlah 615 sekolah baik dari tingkat SD maupun SMP.

Penelitian ini dilakukan dengan rentang waktu kurang lebih selama 4 bulan, bulan september hingga desember 2022. Penulis menggunakan rentang waktu ini untuk melakukan wawancara, kuesioner, observasi dan dokumentasi baik di lingkungan Dinas Pendidikan maupun di instansi pendidikan terkait.

Dinas pendidikan mengakui adanya permasalahan sesuai klaim BPK dan telah melaksanakan rekomendasi BPK secara menyeluruh. Mekanisme SP2TU yang menyalahi aturan sudah dibenahi dengan penerbitan Peraturan Bupati Nomor 56.1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 122 ayat (8) dikatakan bahwa mekanisme BOSDA dikecualikan dalam persyaratan penggunaan TU dengan tidak perlu untuk melampirkan SP2D TU sebelumnya ataupun validasi TU bulan sebelumnya saat pengajuan TU. Jangka waktu TU diperpanjang menjadi paling lama 3 (tiga) bulan untuk membuat laporan pertanggungjawaban dan menyetorkan sisa dana TU (untuk sekolah negeri) sejak tanggal SP2D diterbitkan. Disdik juga melakukan Bimtek dan sosialisasi dalam mekanisme BOSDA.

Namun, masih terdapat masalah dalam mekanisme BOSDA yang berjalan dengan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan BOSDA oleh sekolah dan keterlambatan pencairan dana yang dilakukan oleh Disdik Sleman. Sehingga urgensi dari evaluasi mekanisme ini memang harus dilakukan.

Desain merupakan hal yang sangat krusial dalam perancangan program sehingga diharapkan program dapat

terlaksana sesuai dengan tujuan program serta kebutuhan dari pengguna program tersebut. Desain mekanisme BOSDA sendiri masih banyak kesalahan baik dalam hal jadwal hingga formula anggaran yang digunakan.

Keterbatasan SDM ternyata justru bukan merupakan suatu masalah utama dalam mekanisme ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Disdik mereka mengakui bahwa apabila terdapat perubahan dalam bagan alur mekanisme SDM bukan lagi menjadi suatu masalah.

Pihak pembina dari BOSDA dapat melakukan verifikasi langsung ke sekolah untuk memperpendek alur dan juga sekaligus melakukan monitoring terjadwal sehingga dua permasalahan yang terjadi pada mekanisme ini yaitu SDM dan monitoring dapat terselesaikan.

Penggunaan teknologi dalam mekanisme BOSDA memperbesar kapabilitas sistem walaupun hal ini justru menjadi kelebihan sekaligus kelemahan dari program ini. Ada pihak yang merasa hal ini merupakan kemajuan yang baik namun beberapa pihak juga menolak adanya perubahan ini. Adanya sistem non tunai yang ditetapkan, beberapa sekolah di daerah yang cukup terpencil mengalami kesulitan dalam menemukan vendor untuk bekerjasama, dan beberapa guru juga

berpendapat mereka keberatan harus meluangkan waktu untuk mengantri di bank untuk melakukan transaksi.

Mekanisme BOSDA saat ini juga sedang melakukan pilot test tentang penggunaan aplikasi CMS dan aplikasi SILABOSDA pada beberapa SD Negeri di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan evaluasi proses, program dana BOSDA telah memenuhi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku dalam prosedur implementasinya. Program juga terlaksana dengan baik dengan pelayanan dari Disdik Sleman yang tanggap, cepat, dan responsif. Namun, sistem pengendalian yang dimiliki dari program ini masih sangat lemah. Belum adanya jadwal dalam pengendalian program menjadi kelemahan dalam prosedur program. Padahal pengendalian dan monitoring sangat diperlukan dalam pendeteksian dini apabila terjadi kendala.

Sementara dalam strategi sistem program dana BOSDA masih terdapat keterbatasan yaitu, belum adanya sanksi yang diberikan Disdik Sleman dalam keterlambatan penyampaian laporan dan pelaporan manual yang masih digunakan.

Program dana BOSDA sudah berjalan sesuai dengan sasaran dari program tersebut. Namun, yang masih perlu

diperhatikan adalah belum adanya target yang jelas untuk program tersebut sehingga program seakan berjalan hanya melihat sasaran dan tujuan dari program, tidak terdapat tujuan yang lebih spesifik. Jika terdapat target dan tujuan khusus yang lebih rinci dalam setiap tahun anggarannya, program dapat berkembang bukan hanya dijalankan untuk melaksanakan mandat UU namun juga memiliki tujuan untuk membangun kualitas pendidikan di Indonesia.

Belum adanya indikator keberhasilan program mengharuskan penulis menggunakan konsep akuntabilitas untuk melakukan evaluasi tersebut. Program dana BOSDA pada Disdik Sleman sudah memenuhi empat dimensi akuntabilitas. Akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan sudah terpenuhi dalam program tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil evaluasi dengan metode CIPP pada mekanisme BOSDA di Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, evaluasi konteks menunjukkan masih terdapat masalah dalam pelaksanaan program dana BOSDA yang sedang berjalan meskipun rekomendasi dari BPK telah dilaksanakan oleh Disdik Sleman, sehingga meningkatkan urgensi dari penelitian ini.

Ditemukan adanya masalah dalam setiap tahapan evaluasi. Evaluasi input terdapat masalah dalam desain program dan kapabilitas program. Evaluasi proses terdapat masalah dalam sistem pengendalian dan strategi sistem program dari program dana BOSDA. Sementara pada evaluasi produk belum adanya indikator untuk melakukan perbandingan sehingga penulis melakukan perbandingan dengan sasaran program sehingga sebenarnya dalam evaluasi ini tidak terdapat masalah yang ditemukan karena program BOSDA sudah terlaksana sesuai sasaran. Pembuatan target dan tujuan yang spesifik seharusnya dapat dibuat oleh Disdik untuk kemudian dapat dilakukan skoring.

Belum adanya indikator keberhasilan, tujuan dan sasaran yang spesifik dari program dana BOSDA sehingga peneliti menggunakan akuntabilitas sebagai satuan ukur dalam melakukan evaluasi ini. Peneliti tidak memperoleh dokumen pendukung secara lengkap karena terkendala perizinan. Hal tersebut berpengaruh pada saturasi data pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang peneliti ajukan. Peneliti menyarankan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk membuat bagan alur tentang mekanisme

Dana BOSDA, penjadwalan kembali monitoring, meninjau desain program dengan mempertimbangkan jadwal, formula anggaran dan alokasi SDM, membuat indikator penilaian dan merumuskan target dan tujuan yang lebih spesifik pada setiap tahun anggaran.

Peneliti juga menyarankan untuk Dinas Pendidikan lainnya dapat melakukan kajian tentang nominal anggaran yang sebenarnya dibutuhkan pada operasional sekolah. Bercermin dari dana BOSNAS yang memiliki tiga jenis penyaluran dana yaitu BOS reguler, BOS kinerja, dan BOS Afirmasi. Dapat pula melihat dari program rintisan yang telah dibuat oleh Ristek Dikti dengan World Bank yang membuat formula anggaran BOSDA berkeadilan.

Peneliti juga telah melengkapi penemuan dari BPK tentang alasan mekanisme Disdik Sleman yang belum memadai. Sehingga BPK dapat mempertimbangkan permasalahan ini dan menganalisis kendala keuangan terutama terkait formula anggaran.

Penggunaan model evaluasi CIPP dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dapat digunakan namun tidak dapat dilakukan secara berurutan dalam empat tahap tersebut hal ini dapat menjadi bahan diskusi di penelitian selanjutnya. Mengingat bahwa metode pengumpulan

data melalui wawancara sangat bergantung kepada narasumber.

Peneliti juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas wilayah penelitian, dapat membandingkan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Dapat dilakukan pula evaluasi kembali apabila sudah terdapat indikator penilaian atas program BOSDA pada Disdik Sleman.

## Referensi

- Adawiah, Rabiatul. 2016. *Profesionalitas Guru dan Pendidikan Karakter (Kajian Empiris di SDN Kabupaten Balangan)*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat, Volume 6, Nomor 11, Mei 2016.
- Anderson, B. 2001. *Imagined Communities Komunitas-komunitas Terbayang*. (Intan Naomi Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan 14. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bowens, M. 2005. *Public Accountability. The Oxford handbook of public management*. New York: Oxford University Press. Retrieved from [www.usg.uu.nl/organisatie/medewerkers/m.boven](http://www.usg.uu.nl/organisatie/medewerkers/m.boven)
- BPK. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2020.
- Brinkerhoff, R. O. et al. 1986. *Program Evaluation: A Practitioner's Guide*

- for Trainers and Educators. Fourth Printing. Massachusetts: Kluwer-Nijhoff Publishing. (1983:2)
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fourth Edition (Fourth). Washington DC: SAGE Publication.
- Depdiknas. 2003. *Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas.
- Faegerlind, Ingemar dan Saha, Lawrence J. (2016). *Education and National Development: A Comparative Perspective*. Elsevier.
- Gibbs, G. (2007). *Analyzing qualitative data*. (U. Flick, Ed.). California: SAGE Publication.
- Hamalik, Oemar. (2018). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung. (2018:13)
- Hasanah, Afifatul. (2019). *Evaluasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di MTs Syamsul Arifin Curahkalong Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember*. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember Vol.9 No.2 2022.
- Hilma, Desy. (2019). *Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada SMA N 3 dan SMA N 4 Bandar Lampung dalam Prespektif Goal Oriented Evaluation Model (GOEM)*. Jurnal Pendidikan Progresif Vol. 12 No 2 2022.
- Istanti, Siti. (2013). *Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di SMP Negeri 11 Yogyakarta*. Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, Kependidikan dan Manajemen Pendidikan Tut Wuri Handayani Vol 9 No3 (2020) Maret.
- Jusmin. (2019). *Pengaruh Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Kinerja Kepala Sekolah terhadap Guru Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa di Daerah Pinggiran dan Terpencil*. Jurnal Citizen Education Vol. 1 No. 1.
- Kementerian Dalam Negeri. 2006. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- KSAP. (2021). *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Laksono, S. (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi dari Metodologi ke Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. 2017. *Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah*
- Pemerintah Indonesia. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar*
- \_\_\_\_\_. 2008. *Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan*.
- Pemerintah Indonesia. 1995. *Undang-undang Dasar 1945*
- \_\_\_\_\_. 1999. *Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- \_\_\_\_\_. 2003. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.

- \_\_\_\_\_. 2003. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- \_\_\_\_\_. 2022. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah .
- \_\_\_\_\_. 2014. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.
- Miles, & Huberman. 1994. *Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods.* (T. Oaks, Ed.). California: SAGE Publication.
- Moleong, L. J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Neillisa et al., 2018. *Peran Program BOSDA dalam Perluasan Akses Pendidikan di SMKN 1 Bandar Lampung.* Jurnal Pendidikan Progresif Unila Vol.9 No.2 (2019).
- Nur, Dinar A.R. 2019. *Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah dan Susu SLB Swasta di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga D.I Yogyakarta.*
- Kemendikbud. 2013. *Evaluasi Program Pemberian Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS).* Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan (ACDP).
- Pahlawan, I Made Panji Ananda. 2021. *Pengelolaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Bali pada Masa Pandemi Covid-19.* Jurnbal Ilmiah Wahana Bhakti Praja Vol 11 No.2
- Patton, M. Q. 2002. *Qualitative Research & Evaluation Methods.* (Ralph Erskine Conrad Memorial Fund, Ed.) (3rd ed.). CA: SAGE Publication.
- Rubiyati, Wahyu Ruri dan Ismanto, Bambang. 2020. *Evaluasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar.* Jurnal Kependidikan Vol.6 No.2. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Stainback, Susan William. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research.* Kendall/Hunt Publishing Company: Dubuque, Iowa
- Stark, J.S. & Thomas, A. 1994. *Assessment and program evaluation.* Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing. (1994: 12)
- Stufflebeam, David L and Shinkfield, Anthony J. 1986. *Systematic Evaluation.* USA: Kluwer-Nijhoff Publishing
- Stufflebeam, D. L. et al. 1971. *Educational Evaluation and Decision Making.* Fourth Printing. Illinois: F. E. Peacock Publishers, Inc.
- Stufflebeam, D. L. and Shinkfield, A. J. 1985. *Systematic Evaluation: A SelfInstructional Guide to Theory and Practice.* Massachusetts: Kluwer-Nijhoff Publishing.
- Stufflebeam, D. L., Madaus G. F., dan Kellaghan, T. 2000. *Evaluation Models: Viewpoints on Educational and Human Services Evaluation* (2nd Edition). New York: Kluwer Academic Publishers.
- Stufflebeam, H McKee and B McKee. *The CIPP Model for Evaluation.* (Paper presented at the 2003 Annual

- Conference of The Oregon Program Evaluation Network)*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto A. 2016. *Evaluasi Prosedur Pengalokasian Dana Bantuan Pendidikan dari APBD Kabupaten Karanganyar pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2014-2015*. Jurnal Pendidikan Indonesia (JPI Vol.5 No.1 2018
- Selly et al., (2020). *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dan Bantuan Operasional Sekolah Nasional (BOSNAS) Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri Kota Samarinda terhadap Kinerja Keuangan Sekolah*. [10.29264/JIEM.V5I3.6970](https://doi.org/10.29264/JIEM.V5I3.6970).
- Siyoto, S., & Sodik, A. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian* (1st ed.). Literasi Media Publishing.
- Stainback, S. W. 1988. *Understanding & Conducting Qualitative Research*. Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
- Tayibnapi, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta. (2000:59)
- Tyler, R.W. 1949. *Basic Principles of Curriculum and Instruction*. Chicago: University of Chicago Press.
- Y. Sutrisnawati, I.G.K.A Sunu, K.R Dantes. 2021. *Evaluasi Pelaksanaan Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan Model CIPP (Studi Kasus pada SMK N Se-Kota Denpasar)*
- Weiss, Carol H. 1972. *Evaluation research*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- World Bank. 2013. *BOSDA: Enhancing Equity and Performance Through Local School Grants in Indonesia*.
- Worthen, B. R. dan Sanders J. R. 1987. *Educational Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. New York: Longman Inc.